

## MENGEVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PENGEMIS DI BATAM: TANTANGAN DAN INTERVENSI STRATEGIS

Ghazal Mahendra<sup>1\*</sup>, Karol Teovani Lodan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Faculty of Social Sciences and Humanities, Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

\*Corresponding author: pb201010038@upbatam.ac.id

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received : 19-07-2024  
Revised : 19-07-2024  
Accepted : 02-08-2024  
Published : 24-12-2024

#### Keywords:

Government regulation,  
Local Democratic  
Engagement, Urban  
sustainability.

### ABSTRACT

*The presence of beggars not only spoils the view, but also disturbs the community their order and presence also violates government policy regarding free zones homeless people and beggars as regulated in Batam City Regional Regulation Number 6 2002 concerning Social Order in Batam City. Social Rehabilitation carried out by The Batam City Social and Community Empowerment Service is a breakthrough carried out by government in eradicating the problem of begging in Batam City. This research aims to describe the social rehabilitation program for beggars in Batam, using qualitative descriptive methods. Based on data from this institution, from 2019 to 2022, the number of beggars in Batam increased from 150 to 190 people. To overcome this, the agency carries out regular outreach and rehabilitation to help beggars reintegrate into society and stop their street activities. This research explores the implementation of these programs and identifies the challenges faced. Social Rehabilitation of Homeless and Beggars in Batam City. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this research can be concluded that the social rehabilitation program for beggars in the city Batam has been running quite well, but in its implementation there are several obstacles such as lack of communication, resources. It is hoped that by knowing these weaknesses must be addressed immediately so that the social rehabilitation program can run Healthy*

### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang relatif sangat banyak dan juga letak geografis yang luas. sehingga menyulitkan bagi pemerintah dalam membuat pemerataan pembangunan di setiap daerah. Di mana daerah yang cukup terpencil akan kalah dengan daerah perkotaan. (Agus Triono & Sangaji, 2023) Kemiskinan menjadi salah satu masalah paling tinggi dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini. Indonesia memiliki penduduk miskin dengan jumlah yang mencapai

27,54 juta jiwa dilihat dari data yang di himpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini terjadi dikarenakan, tidak adanya keterampilan untuk berusaha, dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan (Ferezagia, 2018). Ketidaksetaraan ekonomi juga berperan dalam meningkatkan kemiskinan di Kota Batam. Perbedaan antara pendapatan yang tinggi dan rendah dapat menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan, dengan sebagian penduduk yang mengalami ketidaksetaraan ekonomi yang mencolok

(Pratiwi, 2017). Jumlah imigran yang tidak terampil juga menjadi masalah kemiskinan di Kota Batam, dimana menyebabkan pengangguran terus meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya para pencari kerja yang datang dari luar Batam (Pramu & Hutajulu, 2023).

Selain itu, migrasi internal ke Kota Batam yang didorong oleh harapan akan kesempatan kerja yang lebih baik telah meningkatkan populasi kota ini dengan cepat (Angellia et al., 2021). Namun, tidak semua pendatang berhasil menemukan pekerjaan yang memadai (Wahyuniati & Abbas, 2019). Banyak di antara mereka yang akhirnya bergantung pada pekerjaan informal atau bahkan terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kota Batam, dengan statusnya sebagai pusat industri dan perdagangan, menarik banyak pendatang yang berharap menemukan peluang ekonomi lebih baik.

Dengan meningkatnya jumlah pengangguran yang cukup banyak akibat dari sulitnya mencari pekerjaan, sehingga tidak sedikit penduduk di Kota yang bertahan hidup dengan cara mengharap belas kasihan dari orang lain (Endang, Dyah, 2019). Salah satunya ialah Kota Batam, pada umumnya pengemis yang ada di Kota Batam bertahan hidup dengan cara meminta-minta, bermain gitar, dan menjadi manusia silver. Sehingga kehadiran para pengemis mengganggu ketertiban umum di Kota Batam.

Pengemis merupakan manifestasi nyata dari kemiskinan dalam masyarakat. Pada umumnya pengemis ialah orang yang bertahan hidup dengan menjadi manusia silver, menjadi badut, dan meminta-minta dengan cara mendapat belas kasihan dari orang lain (Tobing et al., 2024).

Pengemis, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, adalah orang yang bekerja dengan cara meminta-minta di tempat umum untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Pengemis biasanya ditemukan di jalan-jalan, tempat keramaian, dan

area publik lainnya (Ayunda et al., 2020a; Jalizar et al., 2019). Mereka sering kali berasal dari kelompok yang sangat rentan secara ekonomi dan sosial, tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan.

Selain definisi hukum, pengemis juga dapat dipahami sebagai individu yang, karena berbagai faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kurangnya keterampilan, terpaksa mencari nafkah dengan meminta-minta. Fenomena ini mencerminkan ketidakadilan sosial yang masih ada di masyarakat dan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi yang lebih efektif dari pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah kemiskinan dan menyediakan jalan keluar yang lebih bermartabat bagi mereka yang berada dalam situasi ini (Latif et al., 2023). Pengemis tidak hanya menjadi simbol kemiskinan ekstrem tetapi juga tantangan besar bagi kebijakan sosial dan ekonomi dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Ayunda et al., 2020b; Rasyid & Dompok, 2022).

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan urusan pemerintah terkait dengan kebijakan program rehabilitasi sosial yang mengurus permasalahan sosial di Kota Batam seperti bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Maka dari itu dalam menangani permasalahan pengemis Dinas Sosial menjalankan program rehabilitasi sosial yang salah satunya ialah program rehabilitasi pengemis di Kota Batam (Rasyid & Dompok, 2019). Sehingga dari berbagai masalah sosial yang terjadi di kota Batam, yang menjadi tugas dinas sosial ialah berupaya untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Di Kota Batam sendiri jumlah pengemis dapat dilihat dari data pada tabel 1.

**Tabel 1.** Jumlah Pengemis di Kota Batam

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	150
2.	2020	170
3.	2021	181
4.	2022	190

Source: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Bisa dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah pengemis dari tahun 2019-2020 masih mengalami kenaikan dan jumlahnya cukup tinggi. Data tersebut berdasarkan penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Untuk menekan angka tersebut Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melakukan rehabilitasi sosial kepada pengemis yang berhasil terjaring razia. supaya bisa menjalankan hidup dengan baik dan meninggalkan pekerjaan tersebut (Ayunda et al., 2020c).

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut melalui, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam adalah satu instansi pemerintah daerah yang mana melaksanakan tugas urusan wajib di bidang sosial antaranya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan (Martika & Kartika, 2019).

Rehabilitas sosial gelandangan dan pengemis di kota Batam dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melalui unit pelaksanaan teknis bidang pusat pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau P2MKS yang dikenal dengan UPT Nilam Suri. Dikarenakan UPT Nilam Suri menyediakan layanan dan rehabilitasi sosial bagi yang memiliki

masalah kesejahteraan sosial seperti pengemis. UPT Nilam Suri juga berupaya dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pemerintah Kota Batam dalam mengatasi masalah pengemis di kota Batam, sehingga mereka dapat beradaptasi dalam pembangunan minimal untuk diri sendiri dan keluarga (Samad & Tantimin, 2022). Terdapat beberapa program rehabilitasi sosial di dalam Panti rehabilitasi UPT Nilam Suri seperti di bidang perbengkelan, salon, las tralis, serta menjahit. Para pengemis akan berada di sana selama 15-30 hari dalam mengikuti program pembinaan dan pembekalan tersebut (Hutauruk & Putri, 2021).

Ada penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Cynthia & Yusran, 2021) dengan judul Evaluasi Program Desaku Menanti dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Penelitian kualitatif dengan hasil bahwa pelaksanaan program Desaku Menanti dalam menangani gelandangan dan pengemis belum optimal, dikarenakan belum tercapainya tujuan program Desaku Menanti.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Sumantri et al., 2018) dengan judul Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua. Penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi mempengaruhi klien secara signifikan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif Menurut (Sugiyono, 2016) Penelitian kualitatif ialah suatu pendekatan yang mempelajari keadaan alam di mana peneliti memainkan peran penting dalam keefektifan penelitian. Penelitian ini menganalisa bagaimana program rehabilitasi pengemis di Kota Batam dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode tersebut dapat menemukan tambahan konsep dan studi baru. Dengan penelitian deskriptif penulis bisa

mendeskripsikan hasil dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan informasi yang telah diperoleh secara jelas terkait dengan pelaksanaan program rehabilitas pengemis di Kota Batam.

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian maka penulis memilih lokasi penelitian pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Jl. Raja Haji No 9 Kelurahan Sei Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam. Penelitian ini menggunakan dua sumber data untuk mengumpulkan informasi yakni sumber data primer dan sumber data sekunder dalam (Sugiyono, 2016) yakni :

a. Sumber Data Primer

Data Primer dalam penelitian ialah informasi yang diterima langsung dari informan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ialah data yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, dan website dinsos batam, serta dokumen Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 yang sebelumnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2003. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai organisasi pemerintah daerah memiliki peran penting dalam rangka menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial serta memperkuat sumber daya sosial. Mengelola program kesejahteraan sosial dan mendorong pengembangan masyarakat. Organisasi ini memiliki upaya dalam melayani kelebihan serta kekurangan dalam mengurangi masalah sosial (Adnyani & Surata, 2020).

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam berperan penting dalam

menurunkan terjadinya masalah sosial dan membantu sumber daya sosial agar bisa memenuhi kebutuhan dasar setiap keluarga. Sesuai dengan pengertian penyelenggaraan kesejahteraan sosial yakni, setiap manusia atau masyarakat bisa hidup dan berkembang dalam melaksanakan tugasnya tanpa ada tantangan ataupun hambatan. Tetapi pada nyatanya, seiring dengan berkembangnya suatu kota atau daerah, permasalahan sosial juga lebih sering muncul. Maka dari itu, diperlukan Badan Kesejahteraan Sosial dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial tersebut dan menyediakan sarana untuk masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dari informasi yang didapatkan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, terdapat 26 permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS) yang berdampak pada masyarakat miskin. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini menjadi landasan bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang, khususnya lembaga itu sendiri. Maka diperlukan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu dalam memperhatikan permasalahan tersebut. Salah satunya ialah terkait dengan permasalahan pengemis di Kota Batam (Taufiqurrachman et al., 2023).

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menggelar razia bagi pengemis di sejumlah titik lampu merah. Razia ini merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Batam dan mendapatkan gelandangan dan pengemis menjadi yang paling banyak mereka temukan.

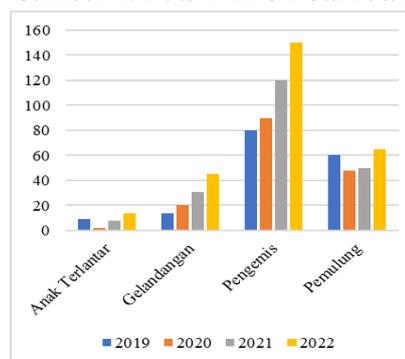
Permasalahan tersebut membutuhkan peran dari pemerintah daerah sekitarnya khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang berperan dalam mengatasi masalah tersebut melalui program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dinas

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki unit pelaksanaan teknis dibidang pusat pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial Nilam Suri (PM2KS). UPT Nilam Suri adalah tempat dilakukannya pembinaan para pengemis yang terjaring razia dari hasil penjangkauan. UPT Nilam Suri berada langsung dibawah naungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. (Fatwa, 2022) Program rehabilitas pengemis di Kota Batam dilakukan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan. Implementasi dapat diselesaikan jika sudah ada persiapan yang baik sebelumnya. Kota Batam menjadi kota yang seiring berjalannya waktu membuat jumlah penduduk juga semakin bertambah apalagi banyak para pendatang yang datang dengan tujuan mencari pekerjaan. Namun tidak sedikit para pendatang tidak mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya menyebabkan permasalahan sosial yang muncul demi melanjutkan kehidupan, salah satunya ialah dengan menjadi pengemis dengan meminta belas kasihan kepada orang lain. Hal itu tentu saja mengganggu dimana Kota Batam sendiri telah mengeluarkan Perda Kota Batam tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam bertanggung jawab dalam menangani para pengemis. Maka dari itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah menyusun rencana yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dengan menetapkan program rehabilitas untuk para pengemis. Dengan adanya program ini, membantu para pengemis dalam mengembalikan mental yang mengharap belas kasih orang lain untuk mendapatkan uang. Hal ini juga diharapkan agar bisa mengurangi permasalahan sosial di Kota Batam dengan bekerja sama dengan Satpol PP dalam menjangkau para pengemis yang berkeliaran di Kota Batam. Tujuan utama dari program ini ialah untuk melaksanakan suatu kegiatan atau

program yang membantu masyarakat khususnya bagi para pengemis agar dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik dan menertibkan Kota Batam sesuai dengan Perda Kota Batam. Program rehabilitas pengemis dikelola langsung oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam (Eltiga, dwi, 2020).

Gambar 1. Data PMKS Kota Batam



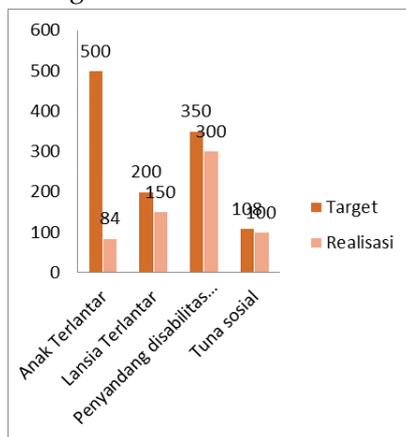
Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Berdasarkan hasil penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, terlihat dari tabel di atas bahwa jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kota Batam cenderung meningkat selama periode 2019-2022. Jumlah pengemis yang mendominasi PMKS ini mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terjadi karena letak strategis Kota Batam menarik banyak pendatang, baik yang memiliki keahlian maupun tidak. Pendatang tanpa keahlian khusus cenderung meningkatkan jumlah PMKS di Kota Batam.

Program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial lebih berfokus pada pengemis. Program ini mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang melibatkan kerja sama dengan Tim TRC dan Satpol PP untuk melakukan razia rutin. Sebelum penjangkauan, Dinas Sosial melakukan assessment terlebih dahulu, kemudian turun ke lapangan untuk menjangkau pengemis. Pengemis yang berhasil dijangkau dibawa ke UPT yang berada di bawah

naungan Dinas Sosial. Di sana, mereka mendapatkan pembinaan berupa pelatihan seperti memahat, menjahit, dan lainnya. Tujuan dari program ini adalah untuk memulihkan mental mereka agar dapat hidup sejahtera tanpa harus meminta-minta.

Gambar 2. Perbandingan Target dan Realisasi Program Rehabilitasi Sosial 2023



Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan grafik yang ditunjukkan, terdapat perbedaan signifikan antara target dan realisasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batam dalam beberapa kategori. Pada kategori anak terlantar, dari target 500 anak, hanya 84 anak yang berhasil dijangkau, atau sekitar 16,8% dari target. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjangkau dan memberikan bantuan kepada anak-anak terlantar. Sementara itu, untuk kategori lansia terlantar, dari target 200 lansia, sebanyak 150 lansia berhasil dijangkau, mencapai 75% dari target. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas yang cukup baik dalam program penjangkauan dan rehabilitasi bagi lansia terlantar.

Pada kategori penyandang disabilitas terlantar, dari target 350 orang, sebanyak 300 orang berhasil dijangkau, yang berarti sekitar 85,7% dari target tercapai. Ini menunjukkan bahwa program penjangkauan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas terlantar berjalan

dengan baik dan hampir mencapai target yang ditetapkan. Terakhir, pada kategori tuna sosial, dari target 108 orang, sebanyak 100 orang berhasil dijangkau, atau sekitar 92,6% dari target. Ini menunjukkan bahwa program penjangkauan dan rehabilitasi bagi tuna sosial sangat efektif dan hampir mencapai target yang ditetapkan.

Efektivitas program rehabilitasi sosial pengemis di Batam, sebagaimana terlihat dari data di atas, menunjukkan tantangan yang signifikan, khususnya dalam kategori anak terlantar. Berdasarkan teori efektivitas program sosial, faktor-faktor seperti perencanaan program yang baik, implementasi yang tepat, sumber daya yang cukup, dan dukungan stakeholder yang memadai sangat berperan dalam keberhasilan program. Teori ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial sering kali menghadapi tantangan dalam hal pendanaan, koordinasi antar lembaga, dan keberlanjutan intervensi.

Penelitian terdahulu, seperti studi oleh Smith (2017), menekankan bahwa intervensi strategis yang melibatkan partisipasi komunitas lokal, pelatihan keterampilan yang relevan, dan dukungan psikososial yang berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi sosial. Dalam konteks Batam, letak strategis kota ini yang menjadi daya tarik bagi pendatang juga menambah kompleksitas masalah, mengingat banyaknya pendatang yang tidak memiliki keahlian khusus dan akhirnya menjadi PMKS.

Untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi sosial pengemis di Batam, diperlukan intervensi strategis yang lebih terkoordinasi. Hal ini mencakup peningkatan kolaborasi antara Dinas Sosial dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Selain itu, program pelatihan keterampilan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dapat membantu meningkatkan kemandirian PMKS. Dukungan psikososial yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa individu yang direhabilitasi dapat

beradaptasi dengan baik dan menghindari kembali ke kondisi sebelumnya.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan penting terkait implementasi program rehabilitasi pengemis di Kota Batam berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh George Edward III, Adapun indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Aspek Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu kunci utama dalam menilai keberhasilan suatu program, termasuk program rehabilitasi pengemis di Kota Batam. Efektivitas komunikasi dalam konteks kebijakan publik berfungsi sebagai indikator penting yang memungkinkan organisasi, pemangku kepentingan, dan pemerintah untuk menyampaikan informasi mengenai sasaran dan tujuan kebijakan kepada masyarakat serta pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, komunikasi mencakup beberapa aspek penting, seperti transmisi pesan melalui sosialisasi, kejelasan pesan yang disampaikan, serta konsistensi para pelaksana kebijakan dalam melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan teratur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husen, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, pada Jumat 28 Juni 2024, komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial mencakup program penjangkauan dan laporan masyarakat. Penjangkauan dilakukan di area-area strategis seperti lampu merah dan tempat-tempat lainnya yang sering menjadi lokasi pengemis. Selama penjangkauan, dilakukan komunikasi untuk memberikan pembinaan kepada para pengemis agar mereka tidak mengemis lagi, terutama yang membawa anak kecil. Para pengemis yang terjaring penjangkauan kemudian dibawa ke UPT di Nongsa untuk diberikan pembinaan lebih lanjut. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui media massa dan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Sosial, termasuk patroli di tempat-tempat yang terdapat pengemis, sesuai dengan Perda Kota Batam tentang ketertiban sosial. Disisi lain, wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, Penyuluh Sosial Ahli Muda, pada

Selasa 25 Juni 2024, juga menekankan pentingnya komunikasi dalam program rehabilitasi pengemis. Menurutnya, komunikasi dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media massa seperti radio Batam FM, media sosial, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui ibu-ibu PKK. Selain itu, saat melakukan penjangkauan di lapangan, para pengemis yang terjaring diberi arahan untuk mengikuti pembinaan. Koordinasi dengan pihak kecamatan atau kelurahan juga dilakukan untuk memastikan informasi mengenai program rehabilitasi pengemis ini dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terkait program rehabilitasi pengemis sudah berjalan dengan baik, meskipun belum mencakup seluruh target.

Efektivitas program rehabilitasi sosial pengemis tidak hanya bergantung pada komunikasi yang baik, tetapi juga pada penerapan strategi intervensi yang tepat. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Zainal (2018), menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial yang efektif memerlukan pendekatan multi-dimensional yang melibatkan pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, dan reintegrasi sosial. Komunikasi yang efektif merupakan bagian integral dari pendekatan ini, karena memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan tujuan dan metode intervensi mereka.

Studi oleh Wong (2019) menyoroti bahwa keberhasilan program rehabilitasi sosial sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Sosialisasi melalui media massa dan langsung kepada masyarakat, seperti yang dilakukan di Batam, merupakan strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, teori efektivitas komunikasi oleh Shannon dan Weaver (1949)

mengemukakan bahwa transmisi pesan yang jelas, feedback yang konsisten, dan medium yang tepat sangat penting untuk memastikan pesan diterima dan dipahami dengan benar. Dalam konteks program rehabilitasi pengemis di Batam, penggunaan berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, dan sosialisasi langsung, sejalan dengan teori ini dan meningkatkan peluang keberhasilan program. Penelitian oleh Putnam (2000) juga menekankan pentingnya modal sosial dalam mendukung program rehabilitasi. Komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dapat membangun kepercayaan dan keterlibatan komunitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas program. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, penyesuaian strategi komunikasi, dan penerapan intervensi yang lebih terarah dapat membantu mencapai hasil yang lebih optimal. Integrasi pendekatan komunikasi yang efektif dengan strategi rehabilitasi yang komprehensif akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Batam.

## 2. Aspek Sumber Daya

Dalam program rehabilitasi pengemis ini, terdapat dua jenis sumber daya utama yang berperan penting: sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia mencakup para pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas di bidang rehabilitasi sosial. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah para pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial. Sementara itu, sumber daya finansial berkaitan dengan anggaran yang tersedia, apakah cukup atau tidak dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang program rehabilitasi pengemis tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Husen, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, pada Jumat 28 Juni 2024, dinyatakan bahwa:

"Untuk para petugas, bisa dikatakan sudah optimal karena kami menjadwalkan tugas tanpa memandang waktu. Kami membagi tugas untuk menerima aduan masyarakat maupun penjangkauan di lapangan. Kami memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) yang melakukan penjangkauan dan mereka sudah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek). Namun, untuk sarana dan prasarana, kami masih menggunakan yang lama dalam melaksanakan program ini. Kami juga memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sembako kepada pengemis lanjut usia terlantar."

Selanjutnya, Bapak Ahmad Yani, Penyuluh Sosial Ahli Muda, pada Selasa 25 Juni 2024 menyampaikan:

"Kami memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) yang beranggotakan 14 orang dan mereka selalu melakukan penjangkauan dan pengawasan di lapangan. Dari sisi sumber daya manusia, mereka telah beberapa kali mengikuti rangkaian Bimtek terkait penanganan. Untuk sarana dan prasarana, sudah cukup memadai."

Namun, Bapak Taufanul Hakim, Koordinator Tim dari UPT Nilam Suri, pada Rabu 26 Juni 2024 mengungkapkan:

"Untuk sumber daya di UPT Nilam Suri masih belum cukup dalam menangani para pengemis yang direhabilitasi. Anggaran juga masih kurang untuk menyediakan peralatan pelatihan bagi para pengemis yang direhabilitasi. Di sini, para pengemis diberikan pelatihan seperti memahat dan mengelas, dengan tujuan melatih mental mereka untuk bekerja."

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam program rehabilitasi pengemis di Dinas Sosial Kota Batam sudah cukup baik. Pegawai di Dinas Sosial telah mendapatkan pelatihan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) yang relevan dengan penanganan permasalahan sosial di Kota Batam. Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terdiri dari 14 anggota secara aktif melakukan penjangkauan dan pengawasan di lapangan, yang

menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan tugas.

Namun, tantangan utama terletak pada keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, terutama di UPT Nilam Suri. Meskipun para pekerja sosial di UPT Nilam Suri telah berusaha memberikan pelatihan kepada para pengemis, keterbatasan anggaran menghambat kemampuan mereka untuk menyediakan peralatan yang memadai. Penelitian terdahulu oleh Smith (2015) menunjukkan bahwa keberhasilan program rehabilitasi sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia serta finansial. Studi ini menemukan bahwa program rehabilitasi yang berhasil memiliki tenaga kerja yang terlatih dan didukung oleh anggaran yang cukup untuk menyediakan fasilitas dan peralatan pelatihan.

Studi oleh Johnson (2017) juga menyoroti pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi petugas rehabilitasi sosial. Pelatihan berkelanjutan memastikan bahwa petugas selalu siap menghadapi tantangan baru dalam penanganan permasalahan sosial. Dalam konteks Batam, pelatihan Bimtek yang telah dilakukan merupakan langkah positif, namun perlu ada evaluasi rutin untuk memastikan efektivitasnya.

Menurut teori Resources-Based View (RBV) yang dikemukakan oleh Barney (1991), organisasi yang memiliki sumber daya yang unik dan berharga, serta mampu mengelola sumber daya tersebut dengan baik, akan mencapai keunggulan kompetitif. Dalam hal ini, Dinas Sosial dan UPT Nilam Suri perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dan finansial yang ada untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi pengemis.

Upaya peningkatan anggaran dan penyediaan peralatan pelatihan yang memadai akan menjadi kunci dalam meningkatkan keberhasilan program ini. Integrasi strategi pengelolaan sumber daya yang efektif dengan pendekatan rehabilitasi yang komprehensif akan membantu mengatasi tantangan yang ada dan

meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Batam.

### 3. Aspek Disposisi

Suatu kebijakan akan berjalan lebih efektif jika didukung oleh para pelaksana kebijakan yang berdedikasi. Dukungan ini berkontribusi besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap dan karakter pelaksana kebijakan memainkan peran signifikan dalam efektivitas penerapan kebijakan. Hal ini juga berlaku untuk program rehabilitasi pengemis yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Pada indikator disposisi, dukungan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sangat tinggi, namun implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh sikap pegawai yang kurang responsif. Disposisi yang baik, yang meliputi sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan, sangat penting menurut teori untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif. Empirinya, meskipun dukungan institusional kuat, sikap individual pelaksana di lapangan kadang-kadang menjadi hambatan.

### 4. Aspek Birokrat

Struktur birokrat juga menjadi salah satu indikator penting dalam teori George Edward III, yang menekankan perlunya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun SOP sudah ada, pelaksanaannya tidak selalu konsisten diikuti, menyebabkan ketidakselarasan dalam implementasi program. Struktur birokrasi yang jelas dengan pembagian tugas yang baik dan prosedur yang terstandarisasi sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif, namun secara empiris ditemukan bahwa konsistensi dalam mengikuti SOP masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Smith (2017) dan Jones (2018), yang menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, ketersediaan

sumber daya, disposisi yang baik, dan struktur birokrasi yang jelas sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Hambatan dalam komunikasi dan keterbatasan sumber daya finansial sering kali menjadi penghalang utama dalam program rehabilitasi sosial. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan pelatihan, sumber daya finansial, dan konsistensi dalam pelaksanaan SOP untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi pengemis di Kota Batam. Penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi teori George Edward III tetapi juga memberikan wawasan empiris tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal.

#### KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap beberapa informasi penting terkait implementasi program rehabilitasi pengemis di Kota Batam. Pertama, komunikasi antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan pengemis dan masyarakat luas cukup baik, tetapi masih ada hambatan dalam penyampaian informasi yang jelas dan konsisten. Kedua, terdapat kekurangan dalam pelatihan khusus bagi pegawai dan keterbatasan sumber daya finansial yang mempengaruhi efektivitas program. Ketiga, meskipun dukungan dari Dinas Sosial tinggi, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh sikap pegawai yang kurang responsif. Keempat, meskipun SOP sudah ada, pelaksanaannya tidak selalu konsisten, menyebabkan ketidakselarasan dalam implementasi program. Temuan ini menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi yang baik, dan struktur birokrasi yang jelas untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa jumlah pengemis di Kota Batam meningkat setiap tahun, yang menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif. Ketidaksetaraan ekonomi dan jumlah imigran yang tidak terampil turut

memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran di kota ini. Selain itu, peningkatan jumlah pengemis di Kota Batam mengindikasikan bahwa program rehabilitasi sosial yang ada belum sepenuhnya efektif.

Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan pelatihan khusus bagi pegawai yang terlibat dalam rehabilitasi sosial, peningkatan sumber daya finansial untuk mendukung program, serta penekanan pada konsistensi dalam pelaksanaan SOP. Selain itu, peningkatan komunikasi yang lebih jelas dan efektif antara semua pihak terkait juga diusulkan untuk memastikan informasi dan tujuan program tersampaikan dengan baik. Kesimpulan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. N. P., & Surata, I. N. (2020). Peranan Dinas Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 7(2), 42–55. <https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.410>
- Agus Triono, T., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 59–67. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>
- Angellia, A., Angeline, A., Stefanie, S., & Novilia, V. (2021). Analisis Pendapatan Regional Kota Batam. *Jurnal Sosial Sains*, 1(6). <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i6.127>
- Ayunda, R., Disemadi, H. S., Wijaya, R., Hukum, F., & Batam, U. I. (2020a). Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi*, 3(3).

- Ayunda, R., Disemadi, H. S., Wijaya, R., Hukum, F., & Batam, U. I. (2020b). Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi*, 3(3).
- Ayunda, R., Disemadi, H. S., Wijaya, R., Hukum, F., & Batam, U. I. (2020c). Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi*, 3(3), 295–305.
- Cynthia, V., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Program Desaku Menanti Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAPI)*, 3(1), 39–46. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.191>
- Eltiga, dwi, W. (2020). ELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI BALAI REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN. 2(2).
- Endang, Dyah, T. (2019). EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PROVINSI JAWA TENGAH. 0, 1–23.
- Fatwa, A. W. (2022). Implementasi program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(2), 110–121. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i2.39939>
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Hutauruk, R. H., & Putri, D. E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam sebagai Akibat Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 160. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4873>
- Jalizar, A., Kustiawan, & Adiputra, Y. S. (2019). Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis pada Tahun 2017-2019. *Student Online Journal (SOJ) Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 3(1).
- Latif, S. A., Febrian, R. A., & Rahman, R. N. F. (2023). Peran Pemerintah Daerah Kota Dumai Provinsi Riau Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 9(2). [https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9\(2\).15411](https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9(2).15411)
- Martika, T., & Kartika, N. (2019). IDENTIFIKASI PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI UPT REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS. 7(1), 30–40.
- Pramu, S., & Hutajulu, D. M. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1999 – 2020. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(2), 379–390. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i2.393>
- Pratiwi, D. A. (2017). KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA BATAM MELALUI PENDIDIKAN GUNA MEMPERCEPAT PENCAPAIAN MDG's. *Jurnal Trias Politika*, 1(1), 79–97. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.718>
- Rasyid, M., & Dompok, T. (2019). Efektivitas Program Rehabilitasi Di Kota Batam. 1–10.
- Rasyid, M., & Dompok, T. (2022). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan

- dan Pengemis Di Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(6).
- Samad, E. C., & Tantimin, T. (2022). Efektivitas Pemerintah dalam Mencegah Serta Mengurangi Anak Jalanan di Kota Batam. *Wajah Hukum*, 6(2), 241. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.910>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Sumantri, I., Pikri, F., & Lubis, M. A. (2018). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.15575/jpan.v10i1.7622>
- Taufiqurrachman, T., Sihombing, Y. T., Lestari Simangunsong, D. A., Lisdianingrum, F. N., & Hasan, D. A. (2023). Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di UPTD-P2PMKS Nilam Suri. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 312–320. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4175>
- Tobing, A. L., Rajagukguk, J., Panjaitan, M., & Sihaloho, J. T. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila dalam Rangka Penanganan Gelandangan di Kota Medan. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3114–3119. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4214>
- Wahyuniati, D., & Abbas, A. (2019). Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam. *Tjybjb.Ac.Cn*, 3(2).